

**IMPAK KREDIT USAHA TANI (KUT) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI
PRODUKTIFITAS USAHA TANI PADI SAWAH PADA KUD LUBUK ALUNG I
DAN KUD KURAI TAJI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

OLEH :

VONNY

89114002 / 3374



Siprials

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1993**

**DAMPAK KREDIT USAHA TANI (KUT) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN PRODUKTIFITAS USAHA TANI PADI SAWAH PADA KUD LUBUK ALUNG I
DAN KUD KURAI TAJI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

OLEH

VONNY

89114002 / 3374

Sipsis

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1993**

DAMPAK KREDIT USAHA TANI (KUT) TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN PRODUKTIFITAS USAHA TANI PADI SAWAH PADA KUD LUBUK ALUNG I
DAN KUD KURAI TAJI . KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Abstrak

Penelitian ini berjudul dampak kredit usaha tani (kut) terhadap penerapan teknologi dan produktifitas usaha tani padi sawah pada KUD Lubuk Alung I dan KUD Kurai Taji . Kabupaten Padang Pariaman , dilaksanakan sejak bulan maret 1993 sampai bulan mei 1993 .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian kredit usaha tani yang dipinjam petani pada kud dan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengembalian kut tersebut serta dampak kut terhadap penerapan teknologi dan produktifitas usaha tani padi sawah .

Materi penelitian ini merupakan studi kasus antara dua KUD yaitu KUD Lubuk Alung I dan KUD Kurai Taji . Dengan menggunakan sampling bertingkat maka didapatkan sampel yang dapat mewakili masing - masing KUD.Terdiri dari 30 sampel untuk KUD Lubuk Alung I (KUD menunggak) dan 30 sampel untuk KUD K.Taji (KUD Lancar) . Data primer diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan petani sampel yang berpedoman pada queisioner. Data sekunder diperoleh dari instansi - instansi terkait.

Variabel yang diukur dan dianalisa meliputi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif meliputi keadaan umum KUD yang diteliti, identitas petani, penerapan teknologi. Untuk menguji penerapan teknologi digunakan score. Data kuantitatif tentang produktifitas usaha tani padi sawah di analisa secara statistik dengan menggunakan uji t antara petani yang menggunakan kredit dan yang tidak menggunakan kredit.

Tingkat pengembalian kredit oleh petani pada KUD LB.Alung I sangat rendah yaitu 11,94 % untuk MT 1987/1988 - 1992/1993, sedangkan pada KUD K.Taji mencapai 92,47 % pada MT 1992/1993 . Faktor penyebab terjadinya tunggakan pada KUD LB.Alung I adalah, pertama dari segi perencanaan, kedua dari segi penyalurannya, ketiga dari segi penggunaannya,dan yang keempat dari segi pengembaliannya.

Tingkat pelaksanaan sepuluh paket teknologi supra insus pada MT 92/93 di KUD LB.Alung I sebesar 51,37 % dan KUD K.Taji sebesar 81,57 % . Produksi rata - rata petani sampel per hektar untuk KUD LB.Alung I adalah 4221 Kg g.k.p dan 6190 Kg g.k.p pada KUD K.Taji .

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebahagian besar (80 %) penduduk Sumatera Barat berusaha di sektor pertanian terutama penduduk yang bermukim di pedesaan, baik pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Usaha dibidang pertanian ini merupakan kegiatan pokok penduduk pedesaan. Sektor perikanan kaligus merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding dengan sektor lainnya, sehingga mendominasi perekonomian daerah pedesaan di Sumatera Barat. Sampai pelaksanaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 Sumatera Barat, struktur perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor pertanian (Departemen Koperasi, 1992).

Karena sebahagian besar petani masih merupakan petani yang tradisional maka untuk meningkatkan produktifitas petani, setiap petani semakin lama semakin tergantung kepada sumber - sumber dari luar lingkungannya. Badan - badan efisien yang memberikan kredit kepada petani dapat menjadi faktor pelancar yang penting bagi pembangunan pertanian. Untuk memproduksi lebih, banyak petani harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, pestisida, pupuk dan alat - alat. Pengeluaran seperti itu harus dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam selama jangka waktu tertentu antara saat pembelian sarana produksi dan saat penjualan hasil pertanian (Mosher, 1968).

Sehubungan dengan itu, Presiden RI mengeluarkan instruksi, supaya diseluruh wilayah RI didirikan, dibina, dan dikembangkan koperasi - koperasi Unit Desa (KUD), dengan harapan agar KUD dapat menjadi pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pe-

aan serta memiliki fungsi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi (Sagimun , 1983).

Kemudian lagi, dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan kelestarian peningkatan produksi padi serta peningkatan fungsi KUD, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan baru dalam hal pemberian fasilitas kredit untuk para petani. Kebijaksanaan ini disebut dengan Kredit Usaha tani (KUT) ,dan dilaksanakan pada musim tanam 1985. Kredit ini diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada KUD dan dari KUD nantinya akan diberikan kepada petani yang benar - benar memerlukan modal untuk meningkatkan produktivitas usahanya (Buletin Koperasi, 1987) .

Sedangkan Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang diberikan pemerintah kepada koperasi unit desa untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi palawija (Munir , 1990).

Sasaran utama dari perkreditan usaha tani adalah memberikan fasilitas permodalan bagi petani yang belum mampu dan benar - benar memerlukan kredit untuk membiayai usaha tani serta melestarikan peningkatan produksi padi dan palawija, sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta memperkuat peranan dan fungsi KUD di pedesaan (Departemen Koperasi,1988).

Semenjak pelita III sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian yang didasarkan pada kebijaksanaan Tri Matra yaitu : pembinaan komoditi terpadu, usahatani terpadu dan wilayah terpadu maka pola pemberian kredit kepada petani tidak lagi berorientasi-

an komoditi tetapi mengarah pada pola usaha tani, yang dikenal dengan Kredit Usahatani Terpadu (KUT). Menurut Departemen Perikanan (1983), Kebijakan ini diambil setelah diadakannya proyek percontohan yang dikenal dengan PPKUT (Pilot Proyek Kredit Usahatani Terpadu) yang diadakan pada beberapa propinsi di Indonesia termasuk propinsi Sumatera Barat. PPKUT ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan produktifitas lahan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan perbaikan lingkungan hidup. (2) Memberikan bantuan finansial dan non finansial yang disediakan pemerintah pada tingkat usaha tani secara optimal. (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan kredit untuk berbagai cabang usahatani bagi petani, perbankan dan instansi yang berkaitan.

Menurut Mubyarto (1985) jika petani telah bersedia menerapkan teknologi baru, maka faktor yang sangat berpengaruh untuk menerapkan teknologi tersebut sepenuhnya adalah faktor ekonomi sebab petani berkepentingan untuk meningkatkan penghasilan keluarganya untuk itu selain besarnya produksi, mereka juga berkepentingan agar biaya produksi dapat ditekan serendah - rendahnya dan penerimaan dari penjualan hasil produksinya dapat meningkat .

Pada pelaksanaannya, KUD dalam memberikan kredit bagi petani menemui hambatan berupa tunggakan - tunggakan yang cukup besar apakah itu dari petani, pengurus KUD ataukah dari pihak lain, meskipun tingkat bunga yang diberikan sangat kecil yaitu 16 % setahun atau 1,3 % dalam satu bulan.

Daerah - daerah penunggak KUT yang besar di Sumatera Barat menurut harian Singgalang adalah Kabupaten Padang Pariaman, Pe

ir Selatan, Solok, Agam dan kotamadya Padang. Kabupaten Padang
riaman, Pesisir Selatan dan Kotamadya Padang sampai batas waktu
September 1989 tercatat tunggakan KUT sebesar Rp 789,049 juta
tanggakan di kabupaten Agam mulai MT 1990/1991 sampai MT
91/1992 tercatat Rp 177,7 juta belum termasuk bunga dan untuk
upaten Solok selama MT 1984/1985 sampai MT 1991/1992 berjumlah
130 juta. Berdasarkan data terakhir dari harian haluan dikata-
 bahwa tunggakan KUT di Sumbar untuk MT 1985/1986 sampai MT
92/1993 mencapai 1,6 milyar.

Menurut Surat Edaran yang dikeluarkan BRI no :S.6 - Dir /
K / 1 / 90 , jika tunggakan KUT melebihi 30 % , maka pemberian
redit akan dihentikan. Dengan dihentikannya kredit petani menja-
kewalahan mencari tambahan modal. Kemungkinan sarana produksi
ng digunakan tidak lagi sesuai dengan yang dianjurkan. Hal ini
sa saja mengakibatkan produksi padi menurun. Kesempatan seperti
a banyak dimanfaatkan oleh tengkulak sehingga petani lebih men-
rita lagi karena harus membayar bunga dua kali lipat.

Melihat perkembangan pemberian kredit di Kabupaten Padang
riaman, maka KUD Lubuk Alung I mempunyai tunggakan terbesar di
nding dengan KUD lain. Dari Rp 25.095.437,00 dana yang direali-
sikan pada KUD Lubuk Alung I terdapat tunggakan sebesar Rp
1.099.367,00 (88,06 %). Dengan adanya tunggakan yang besar
da MT 1987 / 1988, sampai sekarang KUD LB.Alung I tidak lagi
ndapat kredit. Sedangkan pada KUD K.Taji pengembalian kredit-
e lancar dan sampai sekarang tetap diberikan .

IV. HASIL, PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Hasil Penelitian

Gambaran umum daerah penelitian

1.1 Letak dan Topografi

1.1.a. Kecamatan Pariaman Selatan

Kecamatan Pariaman Selatan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 15 m dari permukaan laut. Temperatur berkisar antara 25°C -- 31°C dengan banyaknya curah hujan 250 mm / th dan lamanya hari hujan rata - rata setiap bulan adalah 2 hari.

Luas daerah Pariaman Selatan ± 2407 Ha yang terbagi menjadi 11 desa dan 61 dusun dengan jumlah penduduk 17.449 jiwa yang terdiri dari 8360 jiwa laki - laki dan 9089 jiwa perempuan serta sex rasionya sebesar 1,09.

Batas administrasi daerah ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pariaman Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan nan Sabaris
- Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto sei Sarik
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kecamatan Pariaman Selatan berada dibawah naungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sikabu . Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) meliputi WKPP Kurai taji dan WKPP sei Rotan .

1.1.b. Kecamatan Lubuk Alung

Lubuk Alung terletak di dataran rendah dengan ketinggian 17 m di atas permukaan laut. Sebahagian kecil (10 %) merupakan daerah yang bergembung sampai berbukit. Temperatur berkisar antara 27°C -- 30°C dengan banyaknya curah hujan 3195 mm / th dan lamanya hari hujan rata - rata setiap bulan adalah 12 hari .

Luas daerah kecamatan Lubuk Alung ± 18.774,80 Ha yang terbagi menjadi 19 desa dan 111 dusun. Jumlah penduduk 53.629 jiwa yang terdiri dari 26.249 jiwa laki - laki dan 27.380 jiwa perempuan dengan sex ratio sebesar 1,04 .

Batas Administrasi daerah ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan 2 X 11 enam lingkungan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Anai
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kecamatan Nan Sabaris

Kecamatan Lubuk Alung berada dibawah naungan BPP Sintuk dengan 8 WKPP yaitu : WKPP Pasir Lawas, Singguling, Sei Abang, Tanah Hilir, Sikabu, Sintuk, Toboh gadang Utara, dan Toboh Gadang Selatan.

Luas tanah dan pola penggunaan tanah di Kecamatan Pariaman Selatan dan LB.Alung dapat dilihat pada tabel 2.

Produktifitas usaha tani padi sawah petani sampel pada KUD K.Taji lebih tinggi dibanding dengan produktifitas usaha tani padi sawah petani sampel pada KUD Lubuk Alung I. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan ternyata produktifitas usaha tani padi sawah petani sampel pada KUD K.Taji berbeda nyata dari produktifitas usaha tani padi sawah petani sampel pada KUD LB.Alung I.

Perkembangan produksi dan produktifitas usaha tani padi sawah pada masing - masing seda yang mendapat kredit di wilayah kerja ke dua KUD dapat dilihat pada lampiran B.

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Dampak Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap penerapan teknologi dan produktifitas usaha tani padi sawah pada KUD LB.Alung I dan KUD K.Taji dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pengembalian Kredit Usaha Tani pada KUD Lubuk Alung I sejak tahun 1987 - 1993 adalah 11,94 % dan KUD Kurai Taji 92,47 % tahun 1993.
- 2a. Faktor pendorong lancarnya pengembalian KUT pada KUD K.Taji :
 - seringnya diadakan pertemuan kelompok
 - Aktifnya ketua kelompok tani dan petugas koperasi melakukan penagihan
 - tingginya kesadaran petani
 - adanya usaha pendekatan dari ketua kelompok tani dan pengurus koperasi terhadap petani
 - pendidikan petani yang tinggi

2b. Faktor penghambat pengembalian kredit usaha tani pada KUD

LB. Alung I :

- penyaluran kredit tidak sesuai dengan prosedur
- penyaluran kredit tidak selektif
- terjadinya penyalahgunaan kredit
- tidak aktifnya ketua kelompok tani dan petugas koperasi melakukan penagihan
- pertemuan kelompok jarang diadakan
- kesadaran petani rendah
- pendidikan petani rendah
- tidak ada usaha pendekatan dari ketua kelompok tani dan pengurus koperasi terhadap petani

3. Petani yang mendapat kredit tingkat penerapan teknologi dan produktifitasnya lebih tinggi.

D. SARAN

Dalam usaha menghindari terjadinya tunggakan kredit usaha tani dan diterapkannya teknologi melalui program Supra Insus disarankan :

1. Agar penyaluran kredit lebih selektif.
 - 2a. Agar petani menyadari bahwa hutang itu harus dibayar
 - 2b. Agar kredit dapat dikembalikan tepat pada waktunya diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pengurus KUD, ketua kelompok tani dan PPL.
- 3a. Agar pengetahuan petani tentang populasi tanam, pemupukan, penggunaan PPC, serta pengendalian hama terpadu ditingkatkan.
- 3b. Agar kredit masih tetap diberikan untuk peningkatan penerapan teknologi sekaligus meningkatkan produktifitas.

Daftar Pustaka

- IAK . 1970 . Budi Daya Tanaman Padi. Aksi Agraris Kanisius, Yayasan Kanisius. Yogyakarta. 172 hal.
- Abdurachim , Lih . Prof. Dr. 1986. Pengantar Masalah Penduduk . Alumni . Bandung . 152 hal.
- Malisa . 1979 - 7 . Perang melawan kemiskinan . Centre For Strategic and International Studies . Jakarta . 640 hal .
- Badan Pengendali Bimas . 1988 . Vademecum Bimas Volume IV . sekretariat Badan Pengendali Bimas. Jakarta . 234 hal .
- Buletin Koperasi . 1987 . Edisi / Agustus / September . Proyek Perencanaan dan Penyuluhan Koperasi . 64 hal .
- Departemen Koperasi . 1988 . Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Tani Untuk intensifikasi Padi dan palawija melalui KUD . 159 halaman .
- . 1992 . Bahan Manajemen Berupa Informasi Per koperasian . Pusat pengembangan Manajemen (PPM) Koperasi Sumbang Kerja sama Kanwil Koperasi Sumbang dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Unand . 154 hal .
- Departemen Pertanian . 1983 . Petunjuk Pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Terpadu . Jakarta . 58 hal .
- Faisal . 1987 . Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Besarnya tunggakan Kredit CandaK Kulak pada KUD di Kab Agam Sumbang (Thesis) Faperta Unand . 98 hal .
- Fauzi . 1991 . Analisa Tingkat penerapan Teknologi Serta Pendapatan Petani Supra Insus MT 1990 di WKPP Tapakis Kec Perwakilan Nan Sabaris Kab Padang Pariaman (Thesis). Faperta Unand. 110 hal .
- Jumin , H,B. Ir. 1988 . Dasar - Dasar Agronomi . Rajawali Pers . Jakarta . 140 hal .
- Kadarsan , H,W . 1984 . Keuangan dan Pembiayaan Perusahaan Pertanian Jurusan Ilmu - Ilmu Sosial Politik Pert . IPB Bogor . 99 hal .
- Mosher , A,T .1968 . Menggerakkan dan Membangun Pertanian . C V Yasa Buna . Jakarta . 150 hal .
- Mubyarto . 1985 . Pengantar Ekonomi Pertanian . LP3S Jakarta . 243 hal .